

ry



Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Analisis Dampak Signifikan Optimalnya Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dalam Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

Juwanda Alsya^a, Ratna Widyawati.^b, Herry Wardono^d

^aDinas PUPR Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Way Kanan, Jl. Komplek Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu 34764

^bProgram Profesi Insinyur Fakultas Teknik Unila, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 10 Agustus 2022

Direvisi: 15 September 2022

Kata kunci:

Perencanaan dan Penyerapan Anggaran

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

Realisasi Program

Dalam mencapai indikator kinerja daerah yang baik, berbanding lurus dengan tingkat pelaksanaan anggaran perangkat daerah sehingga apa yang di targetkan dapat tercapai secara maksimal. Dengan memahami isi rincian anggaran, peraturan-peraturan, sumber daya manusia, dan pengadaan jasa serta penyediaan barang pemerintah hingga pelaksanaan belanja, dapat menjadi dasar untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan anggaran dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil pengamatan, secara simultan memperlihatkan penyusunan anggaran, pendistribusian anggaran, peraturan-peraturan, kompetensi, dan pengadaan barang atau jasa memiliki pengaruh positif sekaligus signifikan pada pelaksanaan anggaran belanja di Dinas PU Kabupaten Way Kanan provinsi Lampung. Fenomena tidak maksimalnya tingkat serapan anggaran yang terjadi di Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung didasari dari penyajian data Laporan serapan anggaran tahunan, realisasi serapan pagu di Dinas PU Kabupaten Way Kanan di tahun 2019 sebesar Rp 207.819.331.828,00 dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 260.294.753.828,00 atau hanya mencapai 75,80%

E-mail: pukuk21@gmail.com (Juwanda Alsya).

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemberlakuan otonomi daerah berakibat kepada beralihnya segala kewenangan yang semula diurus pemerintah pusat sekarang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dikarenakan pemerintah daerah secara administrasi dan kebutuhan program serta kegiatan paling memahami perlakuan yang sesuai kebutuhan didaerahnya. Sehingga Otonomi daerah mengakibatkan mempunyai kekuasaan dalam hal pengaturan dan pengurusan pemerintahan dengan ketentuan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan di atasnya.

Pelaksanaan otonomi ini menuntut daerah mampu melakukan pengelolaan keuangan didaerahnya dalam hal .Pengelolaan keuangan aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan diaplikasikan ke dalam bentuk sistem

terpadu dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah.

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan otonom ini memiliki fenomena dalam hal serapan dana daerah. Hal ini terlihat dari daya serap keuangan masing-masing kab/kota di Indonesia yang selalu menumpuk di triwulan ke IV antara bulan oktober s.d Desember. Idealnya pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan memiliki porsi serapan per triwulan, dengan pembagian triwulan I (januari-maret) 25%, triwulan II (april-juni) sebesar 50%, triwulan III (juli-September) 75% dan terakhir triwulan IV (oktober-Desember) 100%. Pada saat terjadi Kegagalan dalam pemenuhan target pelaksanaan kegiatan memiliki dampak yang buruk terhadap output serta manfaat dari sisi pembelanjaan daerah. Inefisiensi serta efektifitas alokasi anggaran akan terjadi dikarenakan tidak terselenggaranya sumber dana terdistribusi dan termanfaatkan pada momen dan waktu yang telah direncanakan. Fenomena tidak terserapnya anggaran secara tepat waktu terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Prov. Lampung hal ini dasari dengan penyampaian laporan hasil realisasi anggaran dimana pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp 208.185.856.275. dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 260.294.753.828.atau hanya mencapai 79,84%. Data

tersebut menjelaskan bahwa daya serap anggaran Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung kurang optimal, hal ini disebabkan tidak sesuai berdasarkan tujuan dan harapan. Optimalisasi serapan pagu anggaran dirasa perlu dilaksanakan untuk memberikan daya ungkit bagi kesejahteraan rakyat sehingga peran pemerintah harus selalu memiliki tujuan dalam mencapai tingkat pelaksanaan secara ekonomis serta efisien (value for money). Pelaksanaan anggaran dapat dikatakan baik apabila memungkinkan tercapainya anggaran yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Mengetahui bagaimana pengelolaan Perencanaan dan penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

II. GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang dikepalai oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki kedudukan di bawah Bupati. Didasari dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, Dinas ini memiliki tugas dan peran penyelenggaraan untuk sebagian urusan Pemerintahan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung khususnya di bidang Pekerjaan Umum, perumahan rakyat, kawasan permukiman, bina teknik serta Penataan Ruang (PUPR) yang berlandaskan pada asas otonomi daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dilanjutkan dengan tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Dan tugas yang lain disesuaikan dengan pemberlakuan kebijakan yang penetapannya dilakukan oleh Bupati Way Kanan dengan didasari peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan didasari dengan Tupoksi (Tugas Pokok serta Fungsi dalam mendukung terwujudnya Misi ke-2 "Meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan dan misi ke-4 "Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur". Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung memiliki Sasaran RPJMD diantaranya :

1. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Meningkatnya Usaha pada bidang Konstruksi.



Gambar 1. Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Prov. Lampung

2.2. Kontribusi Pada Pencapaian Visi Misi

Tujuan serta sasaran adalah wujud dari hasil perumusan pencapaian strategi daerah yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam hal pembangunan yang optimal sebagai wujud dasar rancangan kinerja pembangunan daerah secara integral dan menyeluruh. Rumusan tujuan Pembangunan jangka menengah Daerah dilaksanakan dengan dasar capaian review pada visi serta misi RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026, serta review pada rumusan beberapa isu strategis. Dalam pencapaian visi serta misi Dinas PU mempunyai tujuan yaitu: Penyediaan Infrastruktur bidang pekerjaan umum akan meliputi beberapa hal pokok, yaitu : prasarana sektor sumber daya air , prasarana sektor bina marga dan prasarana sektor keciptakaryaan demi mewujudkan peningkatan kuantitas serta kualitas prasarana, sarana, serta utilitas dasar wilayah. Dan sasaran yaitu: peningkatan Akses Masyarakat pada perumahan, kawasan permukiman yang bersih, layak, nyaman dan lingkungan sehat serta terjangkau dengan dukungan sarana prasarana, serta Utilitas Umum.

2.3. Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan meliputi aspek kuantitatif (Hasan, 2022) (Arbain, 2022) (Martinus, 2022) (Purma, 2022) (Fitriani, 2022) dan aspek kuantitatif (Ananda, 2022) (Putri, 2022) (Kintani, 2021) (Prayogo, 2021) (Sebayang, 2016). Dalam melaksanakan penelitian untuk penyajian data disusun dengan mengumpulkan data yang bersumber pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung..

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Tren Pelaksanaan anggaran Dinas

Pada TA. 2019 Dinas PU Kabupaten Way Kanan Prov. Lampung mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan nilai Rp. 260.294.753.828. Dari total anggaran tersebut kemudian dialokasikan ke dalam program-program dan kegiatan yang disesuaikan porsi program-program yang menjadi unggulan di Renstra Dinas PU.. Kemudian di tahun anggaran 2020 dinas PU mempunyai APBD dengan total nilai Rp 86.913.117.719 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 111.848.776.562.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 258 di tahun 2015 disebutkan dalam rangka melaksanakan



anggaran pada Kementerian atau Lembaga dapat dinyatakan baik, apabila kementerian/Lembaga minimal menyerap anggaran 95% dari pagu total anggaran yang ditetapkan. Gambaran realisasi serapan anggaran Dinas PU Kabupaten Way Kanan Prov. Lampung dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pelaksanaan Anggaran

No	Tahun Pelaksanaan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	2019	7,19%	29,98%	51,44%	79,84%
2.	2020	9,44%	30,66%	59,88%	94,08%
3.	2021	9,88%	31,92%	62,56%	70,22%*

*pelaksanaan pagu triwulan IV tahun 2021 bulan November

Dapat dilihat dalam grafik diatas tren pelaksanaan pagu per triwulan di Dinas PU Kabupaten Way Kanan memiliki tren meningkat/membaik dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya dengan catatan pada triwulan IV tahun 2021 belum selesai hingga bulan Desember.

Keterlambatan pelaksanaan anggaran yang ada dipengaruhi beberapa faktor penentu. Beberapa factor penentu yang dapat digambarkan sebagai berikut :3.1.3. Hasil Klasifikasi Keterlambatan

3.1.1. Belum Optimalnya Perencanaan dari sisi anggaran

Penyusunan rencana anggaran harus merujuk pada kebijakan umum anggaran (KUA) sebagai landasan perhitungan target perencanaan dan target pencapaian daerah sebagai bentuk rumusan program yang akan dituangkan dalam bentuk agenda kerja daerah dengan melihat isu strategis yang berkembang dikalangan masyarakat. Dimulai dengan perhitungan rencana anggaran penyerapan kas (RAK) dalam periode 1 tahun, dikala terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan suatu anggaran merupakan cermin perencanaan yang tidak dilakukan dengan cermat sehingga kontrol pelaksanaan tidak terarah yang dapat menimbulkan gagalnya tujuan dari kebijakan suatu program. Beberapa hal yang mempengaruhi

perencanaan antara lain perubahan kebijakan oleh DPRD ataupun Kepala Daerah maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam proses perencanaan mengalami perubahan kebijakan, hal ini sering terjadi di daerah.

3.1.2. Keterbatasan Waktu Pembahasan Perencanaan Anggaran

Proses Pembahasan anggaran merupakan penggabungan dua elemen Pemerintah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kedua elemen ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hal tarik menarik kebijakan, dimana Kepala Daerah memiliki program strategis dan DPRD pula memiliki pokok pikiran yang harus disetujui. Disinilah pengesahan anggaran sering mengalami kendala, dikala keterbatasan anggaran yang ada menyebabkan sering terlambatnya pengesahan anggaran dikarenakan pemilahan skala prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memenuhi kepentingan di dua elemen pemerintahan. Sehingga seringkali pada bulan Desember pengesahan anggaran yang seharusnya sudah selesai masih dalam proses pembahasan, hal ini menyebabkan di awal tahun ditahun berikut (T+1) pergerakan penyerapan belum dapat dilaksanakan.

3.1.3. Proses Pelaksanaan Penyedia Barang dan Jasa secara E-Procurement

Seringkali pelaksanaan Penyedia barang dan jasa masih dilakukan pada tahun berjalan sehingga pekerjaan fisik bisa terhambat dikala proses penyedia barang dan jasa terjadi gagal tender. Ditambah pula proses lelang atau tender dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki personil pada ULP dalam jumlah sangat terbatas. Hal ini merupakan faktor penghambat pelaksanaan proses pengadaan. Hal ini tentunya faktor penentu juga yang menyumbang untuk keberhasilan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja. Selain itu pada kelompok kerja ULP juga memiliki kekurangan dalam persoalan yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan seperti halnya wajib dilakukan review Harga Satuan sebelum diadakan atau dilaksanakannya Lelang Pekerjaan. Prihal penentuan standard satuan harga yang memiliki pemahaman yang berbeda di masing-masing instansi pemerintah ditambah lagi dengan juklak dan juknis yang sering berubah sehingga memerlukan waktu yang lama dan tanpa disadari melewati triwulan pertama belum lagi penjadwalan pelelangan/tender fisik ataupun supervisi yang memerlukan waktu penyamaan proses pelelangan dimana terdapat perbedaan waktu pelelangan fisik dan pengadaan jasa konsultan supervisi semuanya dilakukan secara on line dengan waktu yang dibatasi.

3.1.4. Kekhawatiran dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Kompetensi dan pemahaman peraturan tentang pedoman pengadaan barang dan jasa merupakan penentu pengambilan kebijakan dari sisi pertanggungjawaban pencairan keuangan. Masih adanya regulasi baru yang belum dikuasai oleh pejabat pelaksana seperti Pejabat Pembuat Komitmen yang menjadikan seringkali terlambatnya proses penyusunan kontrak kerja sehingga proses pelaksanaan dari proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan anggaran sering mengalami keterlambatan yang secara langsung mempengaruhi penyerapan anggaran. Adanya kekhawatiran kuasa pengguna anggaran dalam hal penentu pemenang

tender dapat pula menjadi hambatan dari sisi pelaksanaan, sehingga proses tender atau lelang dilakukan kembali oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan tetap memperhitungkan asas kepatutan dari penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang dan jasa.

3.1.5. Minimalnya Jumlah Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh sumber daya manusia yang terbatas, yaitu 61 ASN, 44 PTHLS. Dengan terbatasnya personil yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan hal ini tidak mendukung Kinerja yang harus dihasilkan oleh Dinas PU untuk mewujudkan Tugas dan Fungsinya.

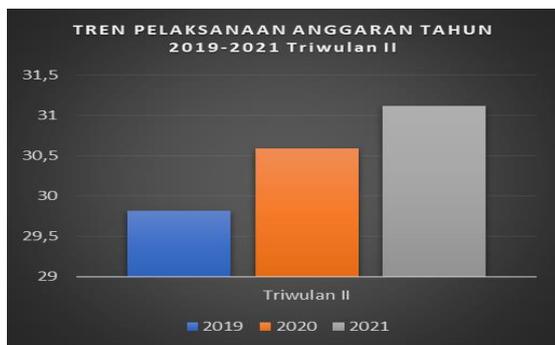
3.2. Pengukuran, Dampak Peran Serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam Memaksimalkan Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran kinerja sub bagian perencanaan dan Keuangan terkait dengan pelaksanaan anggaran triwulan pada Dinas PU dapat dijelaskan dalam grafik berikut :

Grafik 1 Pelaksanaan Anggaran Triwulan I



Grafik 2 Pelaksanaan Anggaran Triwulan II



Grafik 3 Pelaksanaan Anggaran Triwulan III



Grafik 4 Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV



Dari Grafik 1 diatas tergambaran peningkatan persentase pelaksanaan anggaran yang semakin membaik tiap tahunnya, hal ini tidak lepas dari kesigapan sub bagian perencanaan dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA), berkoordinasi dalam penyusunan rencana anggaran kas (RAK) sehingga bidang-bidang yang nantinya akan melaksanakan program kerja dinas tidak mengalami masalah dalam menyusun rencana oprasional kegiatan (ROK) dan dapat melaksanakan tender atau lelang sesuai jadwal kemudian ikut memonitoring kegiatan agar terlaksana sesuai waktu yang ditentukan sehingga dapat melakukan penarikan dana untuk pembayaran pekerjaan tepat waktu.

Catatan untuk triwulan IV pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 belum selesai karena data pelaksanaan anggaran yang diterima merupakan data bulan November. Terlihat pada grafik 3.4, meskipun pada tahun 2021 belum selesai tahun anggaran, namun pelaksanaan anggaran sudah hampir menyamai capaian pelaksanaan anggaran tahun 2019, sehingga diharapkan pada akhir bulan Desember pelaksanaan anggaran dapat mencapai 95% sehingga pelaksanaan anggaran Dinas PU dapat dikatakan baik.

3.3. Hambatan dan Solusi

Hambatan yang sering dihadapi pada proses penyusunan anggaran dan kegiatan sebagai berikut:

- Dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran, KAbupaten Way Kanan Provinsi Lampung telah menggunakan Aplikasi berbasis website, namun Kemendagri juga membuat aplikasi yang mirip dan mewajibkan seluruh OPD untuk melakukan penginputan ulang sehingga dianggap kurang efisien dari segi waktu;
- Pada saat menyusun rencana anggaran kas OPD, Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah cenderung untuk menumpuk anggaran di triwulan IV, sementara dari sudut pandang perencanaan pelaksanaan anggaran idealnya harus disesuaikan dengan rencana operasional kegiatan (ROK) yang sudah disusun oleh bidang-bidang yang nantinya akan melaksanakan program kerja;
- Terdapat tarik ulur kepentingan dalam pembahasan program kerja OPD sehingga waktu dalam penyusunan anggaran seringkali tidak tepat waktu.

Pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- Dalam hal penyusunan anggaran yang berbasis Aplikasi, seharusnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Kementerian dalam Negeri dapat

menentukan salah satu aplikasi yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran dengan catatan aplikasi yang nantinya akan digunakan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain seperti aplikasi pengadaan, aplikasi pelaporan dan aplikasi lainnya sehingga waktu yang digunakan dalam penyusunan anggaran berbasis aplikasi dapat dipersingkat dan dapat berlanjut pada tahap perencanaan anggaran yang lain;

- Dapat dipahami BPKAD cenderung untuk menumpuk anggaran di triwulan IV memiliki alasan tersendiri, namu lebih baiknya agar dapat menyesuaikan dengan Rencana operasional kegiatan (ROK) yang telah disusun oleh bidang-bidang di OPD sehingga dalam proses pencairan dana OPD tidak perlu menyesuaikan lagi ROK yang telah di susun;
- Untuk meminimalisir tarik ulur kepentingan, ada baiknya jika pihak-pihak yang dimaksud dapat menselaraskan usulan-usulan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) serta Renja/Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

IV. KESIMPULAN

Apabila ditarik kesimpulan baik buruknya pelaksanaan anggaran Dinas PU merupakan peran serta seluruh pihak terkait di OPD, namun dengan peran serta sub bagian perencanaan dan keuangan yang optimal, dapat meningkatkan pelaksanaan anggaran yang lebih baik seperti yang dapat kita lihat dalam grafik-grafik yang telah disajikan, sebagian besar OPD yang ada di Kabupaten Way Kanan kurang mengikut sertakan Sub bagian perencanaan dalam proses pelaksanaan anggaran sehingga sering ditemukan ketidaksesuaian antara rencana peyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan. Dampak dari hal tersebut sering terjadinya revisi rencana pelaksanaan anggaran atau sering disebut rencana anggaran kas.

Didasari dari kesimpulan yang ada, peneliti menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran serta masukkan dan menjadi alternative dalam upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung antara lain:

4.1. Belum Optimalnya Perencanaan Dari Sisi Anggaran

Diperlukannya peningkatan kompetensi dan kemampuan para perencana dalam hal menyusun perencanaan yang disertakan dengan Rencana anggaran Kas dan Rencana Operasional Kegiatan, sehingga antara perencanaan awal dan realisasi pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai rencana. Adanya penumpukan serapan anggaran di akhir triwulan berkaitan terhadap mutu, kualitas dari pekerjaan yang dilaksanakan, dikarenakan seolah-olah mengejar target realisasi serapan anggaran

4.2. Keterbatasan Waktu Pembahasan Perencanaan Anggaran

Dibutuhkannya waktu dan ruang khusus antara eksekutif dan legislatif dalam hal penentuan kebijakan perencanaan anggaran, hal ini dilakukan di tahun sebelumnya (T-!) dan bukan hanya dilakukan disaat Musyawarah perencanaan pembangunan akan tetapi dialog yang efektif

dilakukan disaat setelah anggota dewan melakukan kegiatan reses sebagai dasar pokok pikiran dewan dengan melakukan beberapa pemilahan dari sisi perencanaan strategis yang dikuatkan dengan arah strategis perencanaan pembangunan di tahun kedepan oleh Eksekutif. Hal ini dirasakan sanget efektif jika perencanaan teknis dilakukan di tahun sebelumnya sehingga pada saat pembahasan di Acara Musrenbang hanya penguatan kembali dari sisi prioritas anggaran, mengingat ketersediaannya anggaran di suatu daerah.

4.3. Proses Pelaksanaan Penyedia Barang dan Jasa secara E-Procurement

Hal ini dapat menjadi hambatan rencana kegiatan walaupun semua kegiatan telah memenuhi unsur perencanaan operational kegiatan dan perencanaan anggaran kas.. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan peningkatan kompetensi ASN dalam mengelola standard satuan harga dan syarat-syarat khusus dalam memenuhi kebutuhan standard penyedia barang dan jasa secara on line. Dirasakan perlu menyusun kelompok kerja antara ULP dan unit satuan kerja yang membahas khusus secara berkala tentang syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh satuan kerja perangkat daerah sehingga pada saat pengisian on line baik penyedia maupun pelaksana kegiatan hanya melengkapi sebagian dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tender atau penyediaan barang atau jasa. Hal ini sangat efektif dilakukan oleh perencana yang ada di unit satuan kerja secara berkala berkomunikasi tentang perencanaan teknis yang akan dilakukan di tahun kedepan.

4.4. Kekhawatiran dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Perlunya pemahaman bersama tentang peraturan perundang-undangan yang harus disepakati oleh pimpinan unit satuan kerja (Badan/Dinas/Bagian) dan pimpinan ASN dalam hal ini Sekretaris Daerah menyusun petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan anggaran, sehingga pelaksana kegiatan dapat mempedomani petunjuk teknis yang disepakati pimpinan. Sehingga kekhawatiran tentang pelanggaran atau kesalahan penyerapan anggaran dapat diminimalisir. Ada beberapa langkah dalam menyusun anggaran, pimpinan unit kerja dapat melakukan komunikasi dan berkoordinasi secara khusus bersama pihak BPKP dan BPK sehingga secara kepastian hukum pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan memiliki payung hukum yang jelas.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung beserta seluruh jajaran staf dan juga terima kasih pula kami sampaikan kepada para Dosen Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Artikel ini dapat diselesaikan dengan bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari semua pihak, mulai dari proses perkuliahan dan bimbingan sampai pada saat penulisan artikel. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. selaku Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung;
4. **Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng**, selaku Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan artikel ini;
5. **Ir. Herry Wardono, M. Sc. IPM, ASEAN Eng**, selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian artikel ini;
6. **Irza Sukmana, S.T., M.T., PhD**, selaku Penguji atas Koreksi dan arahan dalam Ujian Verifikasi RPL pada PSPPI Unila;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi selama mengikuti perkuliahan;
8. Orang Tuaku tercinta, Istriku dan Anak - anakku yang sudah memberikan Do'a dan semangat serta dukungan demi menyelesaikan laporan Artikel ini;
9. Seluruh rekan - rekan saya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan dan rekan Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung.

Semoga laporan Artikel ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi khalayak secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas RI (2019) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Jakarta. (2019)
- (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Blambangan Umpu. (2019)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.(2020) Renstra - Rencana Strategis 2020-2024 Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, (Januari 2020)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.(2020) RKT - Rencana Kerja Tahunan, Blambangan Umpu. (Januari 2020) Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.(2020) Renja - Rencana Kinerja, Blambangan Umpu. (Januari 2020)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. (2019) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, Blambangan Umpu. (Desember 2019)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. (2020) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, Blambangan Umpu. (Desember 2020)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. (2021) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, Blambangan Umpu. (November 2021)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. (2020) Perjanjian Kinerja, Blambangan Umpu. (Januari 2020)
- Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. (2020) Perjanjian Kinerja Perubahan, Blambangan Umpu. (Oktober 2020)
- Hasan, Y. A., Mardiana, M., & Nama, G. F. (2022). Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas Lpg Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Arbain, A., Muhammad, M. A., Septiana, T., Septama, H. D., & Priadi, R. A. S. (2022). Learning Hoax News Pada Local Dan Cloud Computing Deployment Menggunakan Google App Engine. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Martinus, M., Sukmana, I., Wardono, H., Riszal, A., Telaumbanua, M., Suudi, A., ... & Kurniawan, P. (2022). Pengembangan Sistem Sortasi Buah Duku (Lansium Domesticum) Berdasar Warna Menggunakan Mikrokontroler Arduino Dan Sensor Warna As7262. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(2).
- WP, P. N. S., Nama, G. F., & Komarudin, M. (2022). Sistem Pengendalian Kadar PH dan Penyiraman Tanaman Hidroponik Model Wick System. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Fitriani, M., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Implementasi Association Rule Dengan Algoritma Apriori Pada Data Peminjaman Buku UPT Perpustakaan Universitas Lampung Menggunakan Metodologi CRISP-DM. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Ananda, A. R., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemerintahan Kota Metro Dengan Metode SSADM (Structured System Analysis and Design Method). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Putri, D. D., Nama, G. F., & Sulistiono, W. E. (2022). Analisis Sentimen Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Kintani, A., Nama, G. F., & Muhammad, M. A. (2021). Perancangan Dan Implementasi Augmented Reality Pemantau Jadwal Ruang Kelas Menggunakan Marker Based Tracking. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(2).
- Prayogo, B., Nama, G. F., & Muhammad, M. A. (2021). Rancang Bangun Prototipe Sistem Monitoring Mini Stasiun Cuaca pada BMKG Provinsi Lampung. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(1).
- Sebayang, R. K., Zebua, O., & Soedjarwanto, N. (2016). Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Kandang Ayam Berbasis Mikrokontroler. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 4(3).
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. (2020) Rencana Aksi Tahun 2020, Blambangan Umpu. (Februari 2020)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.(2020) Laporan Kinerja (LKJ), Blambangan Umpu. (Januari 2020)
- Dinas PU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.(2019) Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA, Blambangan Umpu. (Desember 2019)